

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polwan atau biasa disebut dengan polisi wanita merupakan bagian kekuatan pelaksanaan tugas dan fungsi polri sebagai alat penegak hukum, pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, membina dan mewujudkan kamtibmas, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan jabaran teori tugas dan fungsi polwan sebagai integral dari polri berdasarkan undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pada awalnya polwan terbentuk untuk membantu menangani masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Seiring dengan berkembangnya organisasi kepolisian penugasan polwan tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak-anak saja, tetapi mencakup semua tugas-tugas kepolisian baik dalam bidang operasional maupun non operasional, seperti fungsi intelejen, reserse, lalu lintas, pembinaan personil, pengawasan, kesehatan dan lain sebagainya (dalam interpol.go.id diakses 20 Agustus 2018 pukul 18:38 WIB).

Data dari interpol.go.id penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tugas polwan yang pada awalnya hanya terbatas pada perempuan dan anak-anak saja namun saat ini tugas polwan tidak hanya di bidang operasional saja akan tetapi dibidang non operasional, tugas polwan juga sangat membantu dan melengkapi polisi pria.

Pada umumnya seorang pemimpin hanyalah laki-laki, perempuan dianggap tidak bisa berpartisipasi dan hanya bisa mengurus anak serta rumah tangganya. *Stereotype* mengenai perempuan yang cengeng, lemah lembut, emosional sering menyulitkan perempuan untuk dapat meraih posisi sebagai pemimpin dalam (Sudaryono, 2014:232).

Menurut Yulia selaku Kasubbid Pid (kepala sub bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi) mengatakan di Indonesia sendiri kepolisian baru merekrut perempuan menjadi polisi pada 1 September 1948, sebelumnya

kepolisian adalah dunia kerja yang dimonopoli laki-laki. Rekrutmen polwan pertama di Indonesia itu pun dilakukan terutama bukan atas inisiatif kepolisian melainkan karena desakan masyarakat dalam suasana revolusi, agar pemeriksaan termasuk penggeledahan pengungsi perempuan tidak dilakukan polisi laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian merupakan dunia kerja laki-laki, yang mana ada aspek-aspek tertentu dalam pekerjaan polisi yang tidak cocok bagi perempuan, perempuan tidak cocok menjadi polisi karena pekerjaan itu dianggap membutuhkan dominasi, agresivitas, superioritas dan kekuatan. Polwan dianggap tidak mampu mengatasi bahaya, tidak mampu melaksanakan kewenangan, dan tidak seharusnya didorong untuk melakukan pekerjaan yang dianggap dapat menurunkan martabatnya sebagai perempuan (Sudaryono, 2014:232).

Menurut Sudaryono (2014:132), ada kecenderungan perbedaan dalam gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki karena sifatnya tetapi untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif sehubungan dengan tujuan organisasi yang harus dicapainya, tidaklah cukup hanya karena sifat wanita atau karakteristik yang melekat pada dirinya, melainkan banyak faktor lainnya yang ikut mempengaruhinya

Padahal menurut Thibault (2001:57) berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar dalam melaksanakan tugas kepolisian antara polisi wanita dan polisi laki-laki, bahkan polisi wanita dan polisi laki-laki pada dasarnya saling melengkapi. Semua itu disebabkan adanya sikap yang di pengaruhi oleh *stereotype* yang ada di kalangan polisi dan masyarakat yang menganggap tidak benar apabila wanita melakukan tugas kepolisian dan selalu menganggap tugas kepolisian pekerjaan laki-laki (Dwilaksana 2009:22).

Namun di dalam organisasi kepolisian perempuan harus bisa menyamai pria, tidak ada perbedaan dalam menjalankan tugas, wanita harus bisa menjalankan pekerjaannya yang mayoritasnya di kerjakan oleh pria. Maka dari itu seorang pemimpin wanita di organisasi kepolisian harus menunjukkan bahwa wanita sanggup menjalani tugas menjadi seorang pemimpin.

Jaringan wanita Indonesia memandang bahwa setiap warga negara Indonesia tidak dapat di diskriminasi dalam menempati jabatan publik dengan

alasan keyakinan dan jenis kelamin. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum dan politik tidak memandang jenis kelamin maupun keyakinannya. Selain itu, terkait dengan wanita sebagai pemimpin adalah hak yang sudah dilindungi dalam UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (dalam pih.kemlu.go.id diakses 23 Agustus 2018 pukul 17:09 WIB). Untuk menjadi seorang pemimpin wanita tidaklah mudah. Dibutuhkan pendirian yang kuat agar bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin. Pada dasarnya saat remaja, wanita sudah banyak yang membentuk konsep diri mereka. Wanita yang menjadi seorang pemimpin akan mengalami perubahan konsep diri.

Menurut Stuart dan sadeen (Harahap dan Ahmad 2014:87) mendefinisikan konsep diri adalah sebuah ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri yang positif akan memotivasi individu untuk selalu berfikiran positif dan berperilaku positif. Pengertian konsep diri disini adalah sebuah struktur mental yang merupakan suatu totalitas dari persepsi realistik, pengharapan, dan penilaian seseorang terhadap fisik, kemampuan kognitif, emosi, moral etika, keluarga, sosial, seksualitas, dan dirinya secara keseluruhan. Struktur tersebut terbentuk berdasarkan proses belajar tentang nilai, sikap, peran, dan identitas dalam hubungan interaksi simbolis antara diri dengan berbagai kelompok lingkungan asuh selama hidupnya. Terbentuk konsep diri para polwan secara langsung mempengaruhi cara mereka berkomunikasi.

Dengan demikian yang membentuk konsep diri di dalam dirinya baik konsep dirinya negatif ataupun positif dilihat dari aspek-aspek yang membentuk dirinya seperti menurut Calhoun dan Acocella (Ghufron, 2011: 17) mengatakan bahwa konsep diri terdiri dari tiga aspek yaitu pengetahuan dirinya, apa yang individu ketahui tentang dirinya, secara fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, agama, dan lain sebagainya, lalu bagaimana harapan pada saat tertentu, individu yang mempunyai satu aspek pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa depan. Singkatnya, individu mempunyai harapan bagi dirinya sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal sangat berbeda pada masing-masing individu dan bagaimana penilaian di dalam penilaian,

individu berperan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Apakah bertentangan dengan 1) “Siapakah saya”, pengharapan bagi individu; 2) “Seharusnya saya menjadi apa”. Standar bagi individu. Hasil penilaian tersebut disebut harga diri. Semakin tidak sesuai antara harapan dan standar diri, maka akan semakin rendah harga diri seseorang.

Berbagai hasil penelitian di bidang komunikasi menunjukkan bahwa ada perbedaan antara *self concept* pada wanita dan pria. Wanita lebih berorientasi pada pencitraan diri pada penilaian, sedangkan pria pada komparasi sosial. Perbedaan pandangan tentang *self concept* ini tidak lepas dari persepsi dan pencitraan orang terhadap konsep peran yang harus dilakukan oleh seorang wanita (Harahap dan Ahmad 2014:88).

Penulis melihat bahwa seorang wanita menjadi pemimpin sebuah organisasi akan membentuk konsep diri dan membutuhkan komunikasi antar pribadi, komunikasi ini tentunya sangat dipengaruhi oleh konsep diri pemimpin wanita. Penulis melihat bahwa konsep diri pemimpin wanita di dalam organisasi menjadi hal menarik untuk dikaji lebih jauh.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Konsep Diri Pemimpin Wanita dalam Organisasi (Studi Konstruksi Sosial Pemimpin Wanita dalam Organisasi Kepolisian di Humas Polda Metro Jaya)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini pada **Bagaimana Konsep Diri Pemimpin Wanita dalam Organisasi Kepolisian?**.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan latar belakang dan rumusan masalah, berikut adalah identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian:

Bagaimana konsep diri pemimpin wanita dalam organisasi kepolisian?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui konsep diri pemimpin wanita dalam organisasi kepolisian.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan dan menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan Konsep Diri yang merupakan dalam ranah Ilmu Komunikasi mengenai peran konsep diri pemimpin wanita dalam melakukan organisasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu masukan dan pengetahuan lebih dalam tentang peran seorang pemimpin wanita dalam berorganisasi.

